RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(Renja-PD)

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PERIKANAN
Jl. Jenderal Sudirman KM. 7 Telp. (0531) 21640, Fax. (0531) 22729 Sampit 74322
website : http.//dinasperikanan.kotimkab.go.id email : disperikanan@kotimkab.go.id

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/ 0294 /Huk-BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

Memutuskan :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V Kinerja penyelanggaran Pemerintah Daerah; dan

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. RSUD dr. Murjani Sampit;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan [illegible]

31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Kecamatan Kota Besi
33. Kecamatan Cempaga;
34. Kecamatan Mentaya Hulu;
35. Kecamatan Parenggean;
36. Kecamatan Baamang;
37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
40. Kecamatan Pulau Hanaut;
41. Kecamatan Antang Kalang;
42. Kecamatan Teluk Sampit;
43. Kecamatan Seranau;
44. Kecamatan Cempaga Hulu;
45. Kecamatan Telawang;
46. Kecamatan Bukit Santuai;
47. Kecamatan Tualan Hulu;
48. Kecamatan Telaga Antang; dan
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang telah disahkan/ditetapkan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 07 Agustus 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
   U.p Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
   U.p Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

KATA PENGANTAR

Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur disektor Perikanan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan implementasi dan sinkronisasi pembangunan yang dijabarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur disusun untuk memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam pasal 1 Ayat (7) dan Ayat (1) dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 273 Ayat (3), dengan mengacu kepada kedua Undang-Undang tersebut diatas sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan datang.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Drs. AHMAD SARWO OBOI
Pembina Utama Muda
NIP. 19700616 199303 1 005

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAGTASUB BAG	
PELAKSANA	

KATA PENGANTAR

Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur disektor Perikanan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan implementasi dan sinkronisasi pembangunan yang dijabarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur disusun untuk memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam pasal 1 Ayat (7) dan Ayat (1) dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 273 Ayat (3), dengan mengacu kepada kedua Undang-Undang tersebut diatas sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan datang.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Drs. AHMAD SARWO OBOI
Pembina Utama Muda
NIP. 19700616 199303 1 005

DAFTAR ISI

i

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 2

I.3. Maksud dan Tujuan 5

I.4.Sistematika Penulisan 5

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 23

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 26

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja PD 48

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1.Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 56

V. PENUTUP 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Renja PD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat :

1. Kebijakan PD
2. Program dan kegiatan pembangunan yang mencakup aspirasi dan partisipasi masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Adapun prinsip-prinsip dalam pembuatan perencanaan strategis yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. *Proaktif,* dengan adanya perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, maka perlu melakukan perencanaan atas perubahan tersebut secara proaktif dan bukan reaktif.
2. *Berorientasi output,* untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan, maka perencanaan strategik diperlukan agar dapat menuntun diagnosa organisasi kepada pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. *Visioner,* Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada masa depan, sehingga memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
4. *Adaptif dan Akomodatif,* Perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk mewujudkan prioritas daerah yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional, maka implementasi dan sinkronisasi pembangunan diwujudkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Renja Dinas Perikanan disusun berdasarkan rencana kerja dari masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan tetap mengacu pada visi misi Kepala Daerah serta diharmonisasi dan disinergikan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan, forum SKPD, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten dan rapat teknis perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentanng Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu :

a) Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Perikanan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan di biayai dari APBD kabupaten, sumber pembiayaan APBD Provinsi, dan APBN.
b) Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.
c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 4 (Empat) bab dan beberapa lampiran dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Program Renja PD
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024
Bab V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SOPD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu/n-2)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2023)		Catatan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)	12
03.25.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkendalinya pelayanan administrasi perkantoran**											
3.25.01.2.08.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah surat masuk/keluar	4900	surat	1399	surat	700	700	100%	800	4272	115%	
3.25.01.2.08.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik*	Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1 tahun	12	bulan	12	bulan	12	12	100%	12	36	300%	
3.25.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Tersedianya pelayanan jasa admistrasi perkantoran	12	bulan	12	bulan	12	12	100%	12	36	300%	
3.25.01.2.06.07	*Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material*	Tersedianya alat tulis kantor	11400	ATK	3600	ATK	1900	2015	106%	1900	7515	66%	
3.25.01.2.06.05	*Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	12	bulan	12	12	100%	12	36	300%	
3.25.01.2.06.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor*	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12	bulan	12	bulan	12	12	100%	12	36	300%	
3.25.01.2.08.03	*Su Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	12	bulan	12	12	100%	12	36	300%	
3.25.01.2.06.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	Tersedianya bahan bacaan	25	buah	10	buah	5	5	100%	5	20	80%	
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu	12	bulan	12	bulan	12	12	100%	12	36	300%	
3.25.01.2.06.09	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi luar dan dalam kota	324	PP	150	pp	72	59	82%	65	274	85%	
3.25.01.2.07.11	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya*	Jumlah prasarana gedung kantor yang dibangun	3	Paket	0	paket	0	0	0%	0	0	0%	
3.25.01.2.09.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan*	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	160	unit	56	unit	22	22	100%	28	106	66%	
3.25.01.2.09.09	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya*	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	280	unit	100	unit	30	35	117%	50	185	66%	
3.25.01.2.05.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Jumlah pegawai yang terdidik dan terlatih	36	pegawai	12	pegawai	10	6	60%	6	24	67%	
3.25.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan*	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	24	dokumen	8	dokumen	4	4	100%	4	16	67%	

3.25.04.2	***Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***	**Meningkatnya produksi perikanan budidaya**											
3.25.04.2.02.01	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil*	Jumlah kelompok UPR	4	kelompok	0	kelompok	0	0	0%	0	0	0%	
3.25.04.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha*	Jumlah Kelompok pelaku usaha yang difasilitasi	10	kelompok	10	kelompok	10	10	100%	10	20	200%	
3.25.04.2.02.04	*Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan*	Jumlah Kelompok pelaku usaha yang memiliki pendidikan/pelatihan usaha perikanan	10	kelompok	10	kelompok	10	10	100%	10	20	200%	
3.25.04.2.04.01	*Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota*	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidaya Ikan	12	dokumen	12	dokumen	12	12	100%	12	24	200%	
3.25.04.2.04.02	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana Pembudidaya ikan	5	komoditas	5	komoditas	5	5	100%	5	15	300%	
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terjaminnya ketersediaan sarana Pembudidaya ikan	1	kegiatan	1	kegiatan	1	1	100%	1	3	300%	
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah penurunan kematian ikan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100%	1	3	300%	
3.25.04.2.04.05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Darat	Terbina dan terpantaunya Pembudidaya ikan	1	kegiatan	1	kegiatan	1	1	100%	1	3	300%	
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah sarana prasarana yang dikembangkan di SPIL	3	Unit	0	kegiatan	0	0	0%	0	0	0%	
03.25.03	***Program Pengelolaaan Perikanan Tangkap***	**Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**											
3.25.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan*	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Ikan	12	dokumen	12	dokumen	12	12	100%	12	36	300%	
3.25.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Armada dan alat tangkap)	55	unit	55	unit	55	55	100%	55	165	300%	
3.25.03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/kota*												
3.25.03.2.02.01	*Sub kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil*	Jumlah armada perikanan tangkap dan alat tangkap	25	unit	25	unit	25	25	100%	25	75	300%	
3.25.03.2.02.02	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan kecil*	Jumlah Dokumen Kelembagaan nelayan kecil	5	dokumen	0	dokumen	1	1	10%	1	3	75%	
3.25.03.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha*	Jumlah Kelompok pelaku usaha yang difasilitasi	10	Kelompok	10	Kegiatan	10	10	100%	10	20	100%	
3.25.03.2.03	*Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	Jumlah sarana prasarana sentra perikanan terpadu	1	paket	1	paket	1	1	100%	2	2	96%	

3.25.03.2.03.01	*Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	Jumlah TPI	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100%	1	2	100%	
3.25.03.2.03.02	*Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	Jumlah TPI yang terpelihara	1	kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100%	10	94	188%	
3.25.03.2.05	*Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan sampai dengan 10 Gt yang dikeluarkan	1	kegiatan	2	kegiatan	1	1	100%	2	2	180%	
3.25.03.2.05.01	*Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT*	Jumlah dokumen persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan yang dikeluarkan	1	kegiatan	1	kegiatan	1	1	100%	1	3	60%	
3.25.03.2.05.02	*Su Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT*	Jumlah dokumen penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkapan ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang dikeluarkan	1	kegiatan	1	kegiatan	1	1	100%	2	2	75%	
03.25.05	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**												
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota												
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan usaha perikanan tangkap yang dilaksanakan diwilayah Kotim	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0	0%	0	0	0%	
03.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**												
3.25.06.2.02	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Persentase capaian Tingkat Konsumsi Ikan											
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	10	Sertiifikat	0	Sertifikat	0	0	0%	0	0	0%	
3.25.06.2.01	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi usaha Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Tanda Daftar Usaha											
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Tersedianya data dan Informasi Usaha Pemasaran	12	dokumen	12	dokumen	12	12	100%	12	24	80%	

	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Kab. Kotim											
3.25.06.2.03	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**												
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan konsumsi ikan/ragam menu yang dihasilkan	5	Ragam Menu	0	Ragam Menu	0	0	0%	0	0	0%	
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberiaan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha perikanan (UMKM) yang terfasilitasi	10	kelompok	0	Kelompok	0	0	0%	0	0	0%	

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah Tahun 2022

Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang	Indikator Kinerja	Target Renstra SOPD Pada	Realisasi Target Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program/Kegiatan	Perkiraan realisasi capaian		Catatan
	Urusan Pemerintah Daerah dan	Program (Outcome)	Tahun 2021 s/d 2026	Program dan Keluaran	dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun			Renja SKPD tahun	Target program/kegiatan		
	Program/Kegiatan	Kegiatan (Output)		Kegiatan s/d Tahun 2022	2022 (n-1)			berjalan (tahun n-1)	Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2023)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)										
4.1.02	*Retribusi Daerah*										
4.1.02.02	*Retribusi Jasa Usaha*										
4.1.02.02.11	*Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah*										
4.1.02.02.11.0003	*Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan*		150.000.000								
5	Belanja Daerah										
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai										
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	12 Bulan	12	12	100	12	36	300%	
5.1.01.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Tersediannya Tambahan Penghasilan ASN	100%	12 Bulan	12	12	100	12	36	300%	

5.1.01.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN										
3.25.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										
3.25.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah**	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%							
3.25.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan*	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	500 Map Foto Copy 95.000 lembar Paket	500 Map Foto Copy 95.000 lembar Paket	12	12	100%	12	36	300%	
3.25.01.2.05	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas	100%	100%							
3.25.01.2.05.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	6 Pegawai	6 Pegawai	6	0	0	6	12	200%	
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%							
3.25.01.2.06.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor*	Jumlah Komponen listrik/penerangan yang disediakan	250 Alat listrik/penerangan	250 Alat listrik/penerangan (12 Bulan)	12	12	100	12	36	300%	
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%							
3.25.01.2.06.05	*Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	500 Map Foto Copy 95.000 lembar Paket	500 Map Foto Copy 95.000 lembar Paket (12 Bulan)	12	12	100	12	36	300%	
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%							
3.25.01.2.06.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 surat kabar dan majalah	5 surat kabar dan majalah	12	12	100	12	36	300%	

3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%							
3.25.01.2.06.07	*Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material*	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor	4 Bidang	4 Bidang	12	12	100	12	36	300%	
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%							
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	15.840 Makan minum Rapat/Tamu/Kegiatan	15.840 Makan minum Rapat/Tamu/Kegiatan	12	12	100	12	36	300%	
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%							
3.25.01.2.06.09	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi SKPD	250 PP	250 PP	266	167	62%	266		83%	
3.25.01.2.07	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Terwujudnya peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%					7	117%	
3.25.01.2.07.11	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya*	Jumlah prasarana gedung kantor yang dibangun	3 Paket	3 Paket	1	0	0	1	106	66%	
3.25.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%					185	66%	
3.25.01.2.08.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah surat yang dilayani per tahun	900 surat	900 surat	700	1114	159%	700			

3.25.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%					193	82%	
3.25.01.2.08.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik*	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 Bidang	4 Bidang	12	12	100	12			
3.25.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%					24	67%	
3.25.01.2.08.03	*Su Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	250 Alat Kebersihan, 35 spanduk/umbul-umbul	250 Alat Kebersihan, 35 spanduk/umbul-umbul	12	12	100	12			
3.25.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%					16	67%	
3.25.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah bidang yang terlayani per tahun	4 Bidang	4 Bidang	4	4	100	4			
3.25.01.2.09	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***								0	0%	
3.25.01.2.09.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan*	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	28 Unit	28 Unit	28	28	100	28	0	0%	
3.25.01.2.09	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***										
3.25.01.2.09.09	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya*	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1	1	100	1	0	0%	
3.25.01.2.09	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***										
3.25.01.2.09.10	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya*	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	50 Unit	35	30	85%	35	4	100%	
3.25.03	***Program Pengelolaan Perikanan Tangkap***										

3.25.03.2.01	***Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***										
3.25.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan*	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Ikan	12 Dokumen	12 Dokumen	12	10	83%	12	36	300%	
3.25.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Armada dan alat tangkap)	10 Unit	10 Unit					1	25%	
3.25.03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/kota***										
3.25.03.2.02.01	*Sub kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil*	Terciptanya SDM Nelayan yang mandiri	1 kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	23	96%	
3.25.03.2.02.02	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan kecil*	Jumlah kelompok yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum	10 Kelompok	10 Kelompok	10	3	3%	10	23	23%	
3.25.03.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha*	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi			1	1	100	1	94	188%	
3.25.03.2.03	***Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)***										
3.25.03.2.03.01	*Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	Jumlah TPI yang dikelola		1 Kegiatan	1	1	100	1	3	60%	
3.25.03.2.03.02	*Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*			1 Kegiatan	1	1	100	1	15	75%	
3.25.03.2.05	***Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota***										

3.25.03.2.05.01	*Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT*	Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan kapal sampai dengan 10 GT	5 Dokumen		5	5	100	5	15	100%	
3.25.03.2.05.02	*Su Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT*	Jumlah persetujuan pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan sampai dengan 10 GT	5 Dokumen		5	5	100	5	0	0%	
3.25.04.2	***Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***										
3.25.04.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil***										
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Benih Ikan yang dihasilkan UPR dan pembesaran	5 UPR	5 UPR	5	0	0	5	8	67%	
3.25.04.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha*		1 kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	8	67%	
3.25.04.2.02.04	*Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan*		1 kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	61	55%	
3.25.04.2.04	***Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan***										
3.25.04.2.04.01	*Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota*	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidaya Ikan	12 dokumen	12 dokumen	12	7	58%	12	8	80%	
3.25.04.2.04.02	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu)kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana Pembudidaya ikan	2 Komoditas	2 Komoditas	2	1	50%	2	20	80%	
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terjaminnya ketersediaan sarana Pembudidaya ikan	2 Komoditas	2 Komoditas	2	1	50%	2	45,1	120%	
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah penurunan kematian ikan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	2	50%	4	20	80%	

3.25.04.2.04.05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Darat	Terbina dan terpantaunya Pembudidaya ikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1			
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah sarana prasarana yang dikembangkan di SPIL	3 Unit	3 Unit	1	0	0	1	4	133%	
3.25.05	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**										
3.25.05.2.01	**Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota**										
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terpantau/dalam pengawasan			1	0	0	1	3	300%	
3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**										
3.25.06.2.02	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**										
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	10 Sertifikat	10 Sertifikat	10	10	100	10	30	300%	
3.25.06.2.01	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi usaha Skala Mikro dan Kecil**										
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	12 dokumen	12 dokumen	12	7	58%	12	36	300%	

3.25.06.2.03	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah ragam menu yang dihasilkan	5 Ragam	5 Ragam	5	0	0	5	10	200%	
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberiaan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	0	0	1	2	200%	

Dari tabel diatas hasil capaian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Target Renstra 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi sd tahun 2022 sebesar 84,31%
     - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan dengan target 12 bulan terealisasi sebesar 100%
   - **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
     - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya terealisasi sebesar 100%
     - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, sampai dengan tahun 2022 terealisasi sebesar 84,75%
   - **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
     - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan target 12 bulan terealisasi sebesar 99,94%
     - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target selama 12 bulan terealisasi sebesar 99,45%
     - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan terealisasi sebesar 100%
     - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 12 bulan terealisasi sebesar 100%
     - Penyediaan bahan/material, dengan target 12 bulan terealisasi sebesar 99,99%
     - Fasilitasi kunjungan tamu, dengan target 12 bulan terealisasi sebesar 97,03%
     - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, terealisasi sebesar 100%
   - **Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
     - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, terealisasi 99,47%
     - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya, terealisasi sebesar 99,85%
   - **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
     - Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target 12 bulan terealisasi sebesar 100%
     - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dengan target 12 bulan terealisasi sebesar 93,53%

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan target terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan terealisasi sebesar 90,40%

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan target terpenuhinya pemeliharaan, pajak maupun perizinan kendaraan operasional selama 12 bulan terealisasi sebesar 91,39%
  - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, terealisasi sebesar 99,89%
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, terealisasi sebesar 99,70%

2. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**
   - **Pengelolaan, penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
     - Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan, dengan target terpenuhinya data selama 12 bulan terealisasi sebesar 99,81%
     - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, sampai tahun 2022 terealisasi sebesar 99,66%
   - **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten Kota**
     - Pengembangan kapasitas nelayan kecil, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 63,54%
     - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 99,43%
     - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100%
   - **Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**
     - Penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pada tahun 2022 terealisasi sebesar 99,08%
     - Pelayanan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pada tahun 2022 terealisasi sebesar 96,07%
   - **Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota**
     - Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100%

- Pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT, pada tahun 2022 realisasi sebesar 100%

3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- **Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil**
  - Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 99,03%
  - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil realisasi 100 %
  - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 99,96%
  - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100%
- **Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDIPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
  - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDIPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota realisasi 100 % target dan jumlah realisasi terpenuhi.
  - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDIPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota realisasi 99,99 % target dan jumlah realisasi terpenuhi
- **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**
  - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi 97,70 %
  - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi 94,92 %
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi 99,82 %
  - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi 95,00 %
  - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat realisasi 77,79 %.

4. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota.**

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota realisasi 99,97 % target dan jumlah realisasi terpenuhi.

5. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan kecil**
  - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100%
  - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
  - Pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota realisasi 18,66 % target dan jumlah realisasi tidak terpenuhi dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak terbayarkan, sedangkan dalam hal ini Dinas Perikanan sudah menyelesaikan seluruh kegiatan sampai dengan tagihan SPM tetapi tidak terbayarkan/tidak terbit SP2D

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perikanan Kab. Kotim juga mempunyai fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan urusan sektor perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan sektor perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sektor perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan sektor perikanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan pelayanan umum serta pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat pelaku usaha di bidang perikanan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya perairan dan perikanan. Tugas utama lainnya dari Dinas Perikanan adalah memperkuat sarana prasarana produksi perikanan dengan menambah sarana prasarana yang ada, melakukan rehabilitasi sarana prasarana serta melakukan pengembangan atau melaksanakan penerapan teknologi

anjuran bidang perikanan untuk meningkatkan produksi baik itu produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya. Pengembangan sistem usaha dengan melakukan diversifikasi produk pengolahan, melakukan pembinaan dalam hal pemasaran, melakukan manajemen dalam pengelolaan dan pengolahan hasil produk perikanan. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e- Government.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur bertanggung jawab dalam merumuskan konsep penyelesaian masalah-masalah yang timbul di pembangunan perikanan sekarang dan kedepan di daerah yang mengacu pada RPJP Kabupaten Kotawaringin Timur dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan atau masyarakat pelaku usaha perikanan.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Produksi Perikanan	23.734,85 Ton/Thn	24.090,85	24.446,89	24.802,91	25.158,93	25.514,95	25.870,93	19.378,76	20.439,33	23.734,85	24.102,57	27.584,00	26.226,99
2.	Tingkat konsumsi ikan perkapita per tahun	47.3 Kg/Perkapita/Thn	48.00	48.70	49.40	50.10	50.80	50.81	45.20	45.10	47.3	48.49	57.3	51.51
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	54%	56%	58%	60%	62%	64%	66%	54%	54%	54%	11.62%	64%	68%
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	110%	12.993,20	13.611,90	14230,60	14.849,30	15.468	16.086	12.066,56	12.211,49	110%	13.930,08	14.233.14	16.442,70
5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	13.7%	12.54%	62.5%
6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SOPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SOPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, meliputi :

Analisis Kebijakan Strategis Pembangunan Sektor Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Strategi	Kelemahan	Kekuatan	Peluang	Tantangan
1.	Membangun tatakelola Dinas Perikanan yang efektif, produktif, transparan dan akuntabel	1. Belum proposional dengan pembagian anggaran dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjabarkan kebijakan prioritas daerah. 2. Belum optimalisasi pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Perikanan. 3. Lemahnya managemen dalam menjalankan tugas fungsi menggali potensi PAD 4. Lemahnya sistem pengendalian	1. Latar belakang pendidikan aparatur relatif memenuhi syarat 2. Struktur organisasi sudah optimal berdasarkan UU 23 tahun 2014	Peraturan terkait dengan organisasi perangkat daerah dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta kepegawaian	1. Tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparasi kinerja.

		internal karena tidak adanya SOP. 5. Terbatas nya sistem administrasi kelembagaan sumberdaya pelaku usaha perikanan. 6. Menurunnya etos kerja 7. Penempatan sumberdaya aparatur tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan			
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM Perikanan secara mandiri tangguh dan terpadu	1. Terbatas nya akses permodalan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya daya saing kualitas produk perikanan 4. Terbatasnya sdm pelaku usaha perikanan 5. Tidak semua kelompok pelaku usaha memiliki ijin	1. Tersedianya kelembaga pelaku usaha perikanan (KUB, POKDAKAN , POKWASMAS, POKLAHSAR) 2. Tersedianya sarana dan prasarana balai diklat pelatihan dan mobil pintar	1. Fasilitasi pembiayaan dan akses permodalan dari perbankan dan ivestor (CSR) 2. Dukungan anggaran dari pusat terkait pemberdayaan kelembagaan pelaku usaha perikanan 3. Tersedianya pangsa pasar	1. Adanya pemberlakukan sertifikasi 2. Ketrampilan managemen 3.
3	Mengelola potensi perikanan secara berkelanjutan dan lestari berbasis wilayah kawasan dan Sentra	1. Tidak maksimal dalam pemanfaatan sumberdaya alam perikanan 2. Masih banyak	1. Potensi Sumberdaya perikanan masih tersedia 2. Adanya keputusan	1. Adanya RTRWP 2. Adanya kebijakan terkaitan dengan	1. Adanya sektor usaha lain yang mempengaruhi kualitas perairan 2. Masih banyaknya

	Perikanan Terpadu	pengelolaan usaha 3. perikanan yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak ramah lingkungan 4.	kepala daerah tentang Penetapan kawasan minapolitan dan SPT 3. Kebijakan daerah tentang penetapan ikan Jelawat sebagai ikon daerah	pengelolaan kawasan minapolitan dan SPT	kawasan budidaya air payau yang masuk dalam zona holding RTRW Kabupaten
4	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan berbasis IPTEK inovatif, minapolitan dan blue economic	1. Banyaknya kelompok usaha perikanan yang belum memiliki sertifikat 2. Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi iptek yang tepat guna 3. Lemahnya penanganan pasca produksi perikanan tangkap dan budidaya 4. Lemahnya kemampuan didalam memanfaatkan dan mengeola fasilitas dan teknologi 5. Pemasaran produk perikanan masih rendah	1. Tersedianya fasilitas BBI, rumah kemasan, pasar ikan, pabrik es 2. Produk benih ikan yg bersertifikat	1. Arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan menuju blue ekonomic	1. Kerja sama institusi vertikal dibidang perikanan kurang maksimal 2. Produktivitas produksi ikan jelawat didaerah lain lebih besar 3. Penerapan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)

Penjabaran strategi kebijakan pembangunan sektor perikanan terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

Aspek Kajian	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan
	Internal (Kewenangan Dinas Perikanan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Perikanan)	
Ketahanan Pangan	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikanyang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. d. Pengelolaan pembudidayaan ikan.	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.	a. Jumlah tangkap masih kurang akibat terbatasnya armada penangkapan ikan baik di laut dan maupun di perairan umum b. Sarana dan prasarana usaha perikanan dalam mendukung produksi masih terbatas. c. Inovasi Teknologi usaha perikanan masih minim. d. SDM nelayan dan pembudidaya masih kurang terutama penanganan mutu dan kualitas hasil produksi. e. Keterbatasan modal usaha dan akses perbankan f. Daya Saing usaha cukup tinggi g. Hama dan penyakit udang/ikan
Kemiskinan	-	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	a. Jumlah desa miskin wilayah pesisir / angka kemiskinan b. Sinergitas SKPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Air

			Bersih, Listrik)
Daya Saing	a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan. d. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	b. Jumlah SDM bergantung pada kegiatan usaha c. Aspek kualitas SDM dan kelembagaan d. Penguatan teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Dari rancangan yang telah disusun pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan.

Apabila diperhatikan dari pagu indikatif yang diberikan pada rancangan RKPD Dinas Perikanan dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan anggaran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Perikanan terdapat perbedaan (kekurangan) pagu anggaran, yang mana kekurangan anggaran ini akan memberikan dampak (berimplikasi) terdapat rendahnya kemampuan Dinas Perikanan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan khususnya target-target kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat pelaku

usaha perikanan sehingga akhirnya akan berdampak rendahnya capaian kinerja Dinas Perikanan.

Rancangan Akhir RKPD Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	
5	Belanja Daerah				***8,945,883,130***					**11.399.920.000**		
05.01	Belanja Operasi				***4,428,488,560***					**11.399.920.000**		
05.01.01	Belanja Pegawai				***4,428,488,560***					**3.517.920.000**		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				**4,428,488,560**					**3.517.920.000**		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				1,840,590,396					1.730.000.000		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				246,107,136					182.020.000		
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				120,607,250					228.700.000		
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				82,940,496					42.400.000		
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				49,477,750					49,477,750		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				162,931,776					105.500.000		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				11,025,000					9.500.000		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				341,876					1.000.000		
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				97,416,880					72.500.000		
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN				12,000,000					6.000.000		
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				11,550,000					11.500.000		
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK				1,500,000							
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN									**1.128.800.000**		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN				1,792,000,000					**1.128.800.000**		
03.25.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									**2.682.900.000**		
3.25.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah**	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.02.06	*Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap*	Dinas Perikanan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	500 Map Foto Copy	20,537,300		Dinas Perikanan Kab.	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	500 Map Foto Copy	46.500.000		

	Pemeriksaan	Kab. Kotim		95.000 lembar Paket			Kotim		95.000 lembar Paket			
3.25.01.2.05	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas	100%			
3.25.01.2.05.09	*Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	3 Pegawai	41,500,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	3 Pegawai	60.000.000		
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.06.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Komponen listrik/penerangan yang disediakan	250 Alat listrik/penerangan	9,995,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Komponen listrik/penerangan yang disediakan	250 Alat listrik/penerangan	35.000.000		
3.25.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.06.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Bidang	12,208,700		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	14,999,000		
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.06.05	*Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	500 Map Foto Copy 95.000 lembar Paket	19,767,400		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	500 Map Foto Copy 95.000 lembar Paket	43.200.000		
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.06.06	*Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 surat kabar dan majalah	18,600,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 surat kabar dan majalah	20.500.000		
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.06.07	*Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor	4 Bidang	43,000,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor	4 Bidang	55.600.000		

3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	15.840 Makan minum Rapat/Tamu/ Kegiatan	21,000,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	15.840 Makan minum Rapat/Tamu/Kegiatan	47.800.000		
3.25.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.06.09	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi SKPD	250 PP	350,300,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi SKPD	250 PP	400.000.000		
3.25.01.2.07	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Terwujudnya peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Terwujudnya peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%			
3.25.01.2.07.10	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah prasarana gedung kantor yang dibangun	3 Paket	31,892,500		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah prasarana gedung kantor yang dibangun	3 Paket	200.000.000		
3.25.01.2.07	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Terwujudnya peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Terwujudnya peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%			
3.25.01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	3,800,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Terwujudnya peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket			
3.25.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.08.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah surat yang dilayani per tahun	900 surat	5,910,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah surat yang dilayani per tahun	900 surat	15.000.000		
3.25.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah***	Dinas Perikanan	Tersedianya Pelayanan Administrasi	100%			Dinas Perikanan Kab.	Tersedianya Pelayanan Administrasi	100%			

	Daerah	Kab. Kotim	Perkantoran				Kotim	Perkantoran				
3.25.01.2.08.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 Bidang	187,999,554		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 Bidang	205.000.000		
3.25.01.2.08	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Dinas Perikanan Kab. Kotim	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
3.25.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah bidang yang terlayani per tahun	4 Bidang	882,728,786		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah bidang yang terlayani per tahun	4 Bidang	1.200.500.000		
3.25.01.2.09	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***											
3.25.01.2.09.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	16 Unit	156,720,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara	28 Unit	145.800.000		
3.25.01.2.09	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***											
3.25.01.2.09.09	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	39,990,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	87.000.000		
3.25.01.2.09	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Dinas Perikanan Kab. Kotim					Dinas Perikanan Kab. Kotim					
3.25.01.2.09.11	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	15,180,000		Dinas Perikanan Kab. Kotim	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	76.000.000		
03.25.03	***Program Pengelolaan Perikanan Tangkap***									**1.297.700.000**		
3.25.03.2.01	***Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***											
3.25.03.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan*	Kab. Kotim	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Ikan	3 Dokumen	0		Kab. Kotim	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Ikan	12 Dokumen	35.000.000		
3.25.03.2.01.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap*	Kab. Kotim	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Armada dan alat tangkap)		0		Kab. Kotim	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Armada dan alat tangkap)		259.700.000		

3.25.03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/kota*	Kab. Kotim					Kab. Kotim					
3.25.03.2.02.01	*Sub kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil*	Kab. Kotim	Terciptanya SDM Nelayan yang mandiri		0		Kab. Kotim	Terciptanya SDM Nelayan yang mandiri		770.500.000		
3.25.03.2.02.02	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan kecil*	Kab. Kotim	Jumlah kelompok yang berbadan hukum dan jumlah kelompok yang belum berbadan hukum	10 Kelompok	0		Kab. Kotim	Jumlah kelompok yang berbadan hukum dan jumlah kelompok yang belum berbadan hukum	10 Kelompok	55.000.000		
3.25.03.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha*	Kab. Kotim			0					54.500.000		
3.25.03.2.03	*Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	Kab. Kotim										
3.25.03.2.03.01	*Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	Kab. Kotim			0					43.000.000		
3.25.03.2.03.02	*Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	Kab. Kotim			0					50.000.000		
3.25.03.2.04	*Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Kotim			0							
3.25.03.2.05.01	*Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT*	Kab. Kotim			0					5.000.000		
3.25.03.2.05.02	*Su Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT*	Kab. Kotim			0					25.000.000		
3.25.04.2	***Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***									**2.389.500.000**		

3.25.04.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil***											
3.25.04.2.02.01	*Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil*	Kab. Kotim	Jumlah Produksi Benih Ikan yang dihasilkan UPR dan jumlah produksi pembesaran		0					150.000.000		
3.25.04.2.02.02	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan kecil*	Kab. Kotim	Jumlah Pembudidaya berbadan Hukum		0							
3.25.04.2.02.03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha*	Kab. Kotim	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha		0					55.000.000		
3.25.04.2.02.04	*Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan*	Kab. Kotim	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		0					365.000.000		
3.25.04.2.03	***Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***											
3.25.04.2.03.01	*Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Kotim	Terpenuhinya Jumlah Pembudidaya yang memiliki tanda daftar	5 dokumen	0		Kab. Kotim	Terpenuhinya Jumlah Pembudidaya yang memiliki tanda daftar	20 dokumen	5,300,000		
3.25.04.2.03.02	*Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Kotim	Terpenuhinya Jumlah Pembudidaya yang memiliki tanda daftar	2 dokumen	0		Kab. Kotim	Terpenuhinya Jumlah Pembudidaya yang memiliki tanda daftar	20 dokumen	13,780,000		
3.25.04.2.04	***Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan***											
3.25.04.2.04.01	*Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota*	Kab. Kotim	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidaya Ikan	1 dokumen	0		Kab. Kotim	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidaya Ikan	12 dokumen	25.000.000		

3.25.04.2.04.02	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Tersedianya prasarana Pembudidaya ikan	2 Komoditas	0		Kab. Kotim	Tersedianya prasarana Pembudidaya ikan	2 Komoditas	1.300.500.000		
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	terjaminnya ketersediaan sarana Pembudidaya ikan	2 Komoditas	143,549,660		Kab. Kotim	terjaminnya ketersediaan sarana Pembudidaya ikan	2 Komoditas	208,822,450		
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Jumlah penurunan kematian ikan	4 Kegiatan	0		Kab. Kotim	Jumlah penurunan kematian ikan	4 Kegiatan	35.000.000		
3.25.04.2.04.05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Ikan di Darat	Kab. Kotim	Terbina dan terpantaunya Pembudidaya ikan	1 Kegiatan	0		Kab. Kotim	Terbina dan terpantaunya Pembudidaya ikan	1 Kegiatan	56.000.000		
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Kab. Kotim	Jumlah sarana prasarana yang dikembangkan di SPIL	3 Unit	0		Kab. Kotim	Jumlah sarana prasarana yang dikembangkan di SPIL	3 Unit	350.000.000		
03.25.05	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**									**71.000.000**		
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kotim			0		Kab. Kotim			35.500.000		
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya		0		Kab. Kotim	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya		35.500.000		
03.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**									**1.440.900.000**		
3.25.06.2.02	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Kotim	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	10 Sertifikat	0		Kab. Kotim	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	10 Sertifikat	125.000.000		
3.25.06.2.01	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi usaha Skala Mikro dan Kecil**											

3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	12 dokumen	0		Kab. Kotim	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	12 dokumen	35.000.000		
3.25.06.2.03	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Jumlah ragam menu yang dihasilkan	5 jenis	0		Kab. Kotim	Jumlah ragam menu yang dihasilkan	5 jenis	500.000.000		
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberiaan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Jumlah UMKM yang difasilitasi		0		Kab. Kotim	Jumlah UMKM yang difasilitasi		780.900.000		

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme masukan atau pun usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan (MUSRENBANG) baik itu tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, maupun di tingkat Nasional akan di masukan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan skala prioritas pembangunan dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan di sektor Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan rencana program utama yaitu.

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar.
5. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu.
6. Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
7. Program Pendataan dan Perijinan Perikanan.
8. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.
9. Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan
10. Program Pengembangan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kotawaringin Timur
Dinas Perikanan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kec. Kotabesi**			
1.	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Camba	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	5,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
2.	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Kotabesi Hulu		5,000,000	
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kec. Parenggean**			
3.	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan 12 Set (Jaring dan Kail)	Manjalin, Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	6,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
4.	Pengadaan Perahu Tanpa Mesin 6 Unit			24,000,000	
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kec. Mentaya Hilir Selatan**			
5.	Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	Handil Sohor	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	150,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
6.	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Jaya Kelapa		10,000,000	
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kec. Pulau Hanaut**			
7.	Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Berukuran 3 - 4 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	Babaung	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	650,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
8.	Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Berukuran 3 - 4 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	Bamadu		650,000,000	
9.	Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Berukuran 3 - 4 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	Bapinang Hilir	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	1,950,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
10.	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Bapinang Hilir Laut		50,000,000	
11.	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Hantipan		5,000,000	
12.	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Satiruk		5,000,000	
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kec. Antang Kalang**			
13.	Pengadaan Mesin Perahu/Kapal Perikanan untuk perairan umum daratan	Tumbang Ramei	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	15,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kec. Teluk Sampit**			
14.	Pengadaan Mesin Perahu/Kapal Perikanan untuk perairan umum daratan	Lampuyang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat	100,000,000	Belum Terakomodir Dana di

15.	Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	Regei Lestari	Kapasitasnya	750,000,000	SOPD
16.	Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Berukuran 3 - 4 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	Ujung Pandaran		650,000,000	
17.	Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	Basawang		600,000,000	
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	**Kec. Cempaga Hulu**			
18.	Pengadaan Perahu Tanpa Mesin	Parit	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	8,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
19.	Pengadaan Perahu Tanpa Mesin	Pantai Harapan		8,000,000	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Kec. Kota Besi**			
1.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Palangan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
2.	Pengadaan Karamba Ikan	Palangan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	310,552,472	Belum Terakomodir Dana di SOPD
3.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Kandan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000	
4.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Kandan		35,000,000	
5.	Pengadaan Pakan Ikan	Kandan		12,500,000	
6.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Rasau Tumbuh		70,000,000	
7.	Pengadaan Karamba Ikan	Rasau Tumbuh	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	172,529,151	
8.	Pengadaan Karamba Ikan	Soren		86,264,576	
9.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Soren	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,000,000	
10.	Pengadaan Karamba Ikan	Kota Besi Hilir	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	172,529,151	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Kec. Parenggean**			
11.	Pengadaan Bibit Ikan Gurame	Beringin Tunggal Jaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,500,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
12.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Beringin Tunggal Jaya		3,500,000	
13.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Sumber Makmur		14,000,000	
14.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Karya Bersama		8,750,000	
15.	Pengadaan Bibit Ikan Gurame	Bandar Agung		87,500,000	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Baamang			
16.	Pengadaan Mesin Alkon (Poktan Sekumpul Lestari) , Kab. Kotawaringin Timur	Baamang Hulu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD

17.	Pembuatan Kolam Bioflok (Pokdakan Mina Asa) , Kab. Kotawaringin Timur	Baamang Hulu	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	151,515	
18.	Pembuatan Kolam Indukan (Pokdakan Mina Asa) , Kab. Kotawaringin Timur	Baamang Hulu		909,091	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. MB. Ketapang			
19.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Bangkuang Makmur	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	84,000,000	- Belum Terakomodir Dana di SOPD
20.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Bapeang		10,500,000	
21.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Pelangsian		350,000,000	
22.	Pengadaan Kolam	Bapanggang Raya	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	0	
23.	Pengadaan Pakan Ikan	Bapanggang Raya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	0	
24.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Bapanggang Raya		0	
25.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Bapanggang Raya		0	
26.	Pengadaan Bibit Ikan Gurame	Telaga Baru		105,000,000	
27.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Telaga Baru		105,000,000	
28.	Pengadaan Pakan Ikan	Telaga Baru		270,000,000	
29.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Mentawa Baru Hulu		350,000	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Mentaya Hilir Utara			
30.	Pembuatan Kolam Ikan untuk budidaya ikan di Dusun Rongkang. Uk. 4 x 5 M, sebanyak 5 Buah Kolam.	Natai Baru	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	757,576	Belum Terakomodir Dana di SOPD
31.	Pengadaan Bibit Ikan Patin untuk Dusun Rongkang. sebanyak 10.000 Ekor.	Natai Baru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	35,000,000	
32.	Pengadaan bibit ikan lele + pakan + Kandang (3mx3m sebanyak 30 unit)	Pondok Damar		70,000,000	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Mentaya Hilir Selatan			
33.	Pengadaan Kolam	Samuda Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	11,363,636	Belum Terakomodir Dana di SOPD
34.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Samuda Kecil	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	70,000,000	
35.	Pengadaan Pakan Ikan	Basirih Hulu		50,000,000	
36.	Pengadaan Kolam	Jaya Kelapa	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	2,272,727	
37.	Peningkatan jalan produksi perikanan	Samuda Besar		20,625,000,000	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Pulau Hanaut			
38.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Bantian	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	105,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
39.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Bapinang Hulu		3,500,000	
40.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Bapinang Hulu		3,500,000	
41.	Pengadaan Kolam	Penyaguan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	18,939,394	

42.	Pengadaan Kolam	Rawa Sari	yang Difasilitasi	34,090,909	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Antang Kalang			
43.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Tumbang Gagu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	70,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Seranau			
44.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Ganepo	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	52,500,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Cempaga Hulu			
45.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Bukit Batu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	70,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
46.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Pelantaran		140,000,000	
47.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Pelantaran		140,000,000	
48.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Pelantaran		70,000,000	
49.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Pelantaran		105,000,000	
50.	Pengadaan Karamba Ikan	Pelantaran	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	414,069,962	
51.	Pengadaan Terpal	Pelantaran		10,000,000	
52.	Pengadaan Kolam	Pelantaran		909,091	
53.	Pengadaan Pakan Ikan	Pantai Harapan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	1,000,000	
54.	Pengadaan Bibit Ikan Gurame	Sudan		10,500,000	
55.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Sudan		10,500,000	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Telawang			
56.	Pengadaan Kolam	Kenyala	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	11,363,636	Belum Terakomodir Dana di SOPD
57.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Kenyala	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	17,500,000	
58.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Kenyala		17,500,000	
59.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Sebabi		35,000,000	
60.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Sebabi		35,000,000	
61.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Tanah Putih		35,000,000	
62.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Tanah Putih		35,000,000	
63.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Sumber Makmur		17,500,000	
64.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Sumber Makmur		17,500,000	
65.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Sumber Makmur		17,500,000	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Bukit Santuai			

66.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Tumbang Sapia	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	35,000,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
67.	Pengadaan Bibit Ikan Jelawat	Lunuk Bagantung		3,500,000	
68.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Lunuk Bagantung		3,500,000	
69.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Lunuk Bagantung		3,500,000	
70.	Pengadaan Bibit Ikan Jelawat	Tumbang Tawan		70,000,000	
71.	Pengadaan Kolam	Tumbang Kaminting	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	15,151,515	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kec. Telaga Antang			
72.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Tukang Langit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	17,500,000	Belum Terakomodir Dana di SOPD
73.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Bukit Indah		70,000,000	
74.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Bukit Indah		70,000,000	
75.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Desa Bukit Indah Desa Tumbang Mangkup Desa Tumbang Boloi		70,000,000	
76.	Pengadaan Bibit Ikan Nila			35,000,000	
77.	Pengadaan Bibit Ikan Lele			17,500,000	
78.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Desa Rantau Tampang		35,000,000	
79.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Rantau Tampang		17,500,000	
80.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Rantau Tampang		17,500,000	
81.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Desa Rantau Katang		7,000,000	
82.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Rantau Katang		7,000,000	
83.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Rantau Katang		7,000,000	
84.	Pengadaan Kolam	Desa Rantau Sawang	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi	11,363,636	
85.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Desa Rantau Sawang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	3,500,000	
86.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Rantau Sawang		3,500,000	
87.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Batu Agung		8,750,000	
88.	Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Batu Agung		8,750,000	
89.	Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Luwuk Kowan		35,000,000	
90.	Pengadaan Bibit Ikan Nila	Desa Luwuk Kowan		17,500,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang KKP menjabarkannya dalam 4 pilar yang menjadi misi KKP yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan difokuskan dalam menjalankan 4 (empat) dari 9 Misi presiden yaitu.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan (misi 1)
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional (misi 2)
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan (misi 4), dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP (misi 8)

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, sebagai penjabaran 5 Misi di atas, yang penjabaran lebih lanjut sebagai langkah langkah strategis dalam arah Kebijakan pembangunan Kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dengan memperhatikan 5 dimensi pembangunan nasional yakni sebagai berikut.

1. Menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir;
2. Mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan produksi, produktivitas,standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk perikanan perikanan;

4. Meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta;
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan, disamping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tat Kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan *(Life below Water).*

Arah kebijakan KKP berimplikasi pada pelayanan Dinas Perikanan sesuai kewenangan terutama terkait dengan percepatan pembangunan kewilayahan dengan membentuk kawasan sentra perikanan terpadu dan kawasan minapolitan, pelaksanaan pembangunan lintas sektoral pada kawasan-kawasan perikanan dan pengelolaan potensi perikanan dan daya saing melalui pengembangan ikan spesifik lokal ungggulan yang cenderung lebih tahan terhadap perubahan lingkungan, pengembangan sistem rantai dingin, pendampingan kegiatan budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang ramah lingkungan, untuk mendukung serta melakukan peningkatan kualitas dan disiplin aparatur perikanan.

Adapun Arahan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dititik beratkan dalam terwujudnya Pembangunan Perekonomian yang mandiri dan bewawasan lingkungan yang dituangkan dalam kebijakan antara lain.

1. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan
2. Mengelola pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)
3. Membangun kemandirian dalam budidaya perikanan
4. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha sektor perikanan melalui strategi kebijakan antara lain perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya ikan
5. Pembangunan kewilayahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Program Renja PD

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dan merupakan penjabaran/implementasi dari Misi yang dijabarkan dalam RPJMD menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan untuk jangka waktu lima tahun (2016 – 2021).

Misi 3. RPJMD : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

Selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan sebagai berikut.

Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing produk dan manajemen sistem pengendalian dan standarisasi potensi dan produk perikanan secara terintegrasi

Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

Didukung dengan Program :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Misi 3: **Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja**								
1	Meningkatnya daya saing produk dan manajemen sistem pengendalian dan standarisasi potensi dan produk perikanan secara terintegrasi	Meningkatnya Nilai Tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB						
			- *Jumlah informasi yang bisa diakses dan jumlah kemitraan pelaku usaha perikanan*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
			- *Jumlah promosi yang*	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

				diikuti						
		Menguatnya perekonomian rakyat	Persentase jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang berdaya saing							
			-	*Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pelaku usaha perikanan*	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
			-	*Jumlah pelaku usaha yang mengikuti diklat*	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
			-	*Jumlah kelompok yang berbadan hukum dan Jumlah kelompok yang belum berbadan hukum*	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
			Persentase jumlah rekomendasi SIUP, Tanda Pencatatan dan Pendaftaran Usaha Perikanan yang diterbitkan							
			-	*Jumlah rekomendasi SIUP*	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi
			-	*Jumlah Tanda Pencatatan dan Pendaftaran Usaha Perikanan*	25 TPUP	25 TPUP	25 TPUP	25 TPUP	25 TPUP	25 TPUP

2.	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Persentase peningkatan daya saing produk perikanan						
			-	*Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan di rumah kemasan dan pasar ikan*	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			-	*Jumlah sertifikat yang dikeluarkan*	4 sertifikat	4 sertifikat	4 sertifikat	4 sertifikat	4 sertifikat	4 sertifikat
			-	*Jumlah ragam menu yang dihasilkan*	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
			Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap						
			-	*Jumlah sarana prasarana TPI yang dibangun*	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			-	*Jumlah sarana TPI yang terpelihara*	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
			-	*Jumlah armada perikanan tangkap dan alat tangkap*	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
			Persentase sarana prasarana kawasan						

			Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu yang dikelola						
			- *Jumlah sarana prasarana sentra perikanan terpadu*	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket
			Persentase potensi dan usaha perikanan yang dikelola						
			- *Jumlah usaha perikanan yang dikembangkan*	2 komoditas	2 komoditas	2 komoditas	2 komoditas	2 komoditas	2 komoditas
			- *Jumlah sarana prasarana produksi usaha perikanan*	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
			- *Jumlah desa yang dilakukan pemantauan kualitas lingkungan*	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa
			- *Jumlah dokumen data statistik perikanan*	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
			Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya						
			- Jumlah produksi benih ikan yang dihasilkan UPR	250 ribu ekor	250 ribu ekor	300 ribu ekor	300 ribu ekor	400 ribu ekor	400 ribu ekor

			-	Jumlah produksi pembesaran	5.596,04 ton	6.368,29 ton	7.259,85 ton	8.225,41 ton	9.294,7 ton	9.294,7 ton
			Persentase jumlah usaha perikanan berbasis kawasan dan produk unggulan							
			-	*Jumlah kawasan budidaya yang dikembangkan*	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
			-	*Jumlah sarana prasarana yang dikembangkan di SPIL*	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
			Persentase peningkatan produksi komoditas ikan unggul							
			-	*Jumlah produksi benih Ikan unggul dan Jumlah produksi Calon Induk/Induk Ikan unggul*	600 ribu ekor	600 ribu ekor	1,5 juta ekor	2 juta ekor	2,5 juta ekor	2,5 juta ekor
			Persentase produk dan potensi perikanan yang dipromosikan							
			-	*Jumlah kegiatan promosi kemitraan usaha*	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam tahun anggaran 2024 terdiri atas 2 bagian program yaitu sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan pada setiap SOPD yang terdiri atas Program dan kegiatan sebagai berikut :
   1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas Sub-Sub kegiatan:
      a. Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
      g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan dan Material
      h. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
      i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      j. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      k. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      l. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      m. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      n. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      o. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      p. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
      q. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      r. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program dan kegiatan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan yang terdiri atas program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   2.1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya , terdiri atas kegiatan :

a. Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) kabupaten/Kota
2. Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu dana indikatif yang dibutuhkan menyesuaikan dengan rancangan pagu yang diberikan tim anggaran untuk menyusun Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan usulan rencana program dan kegiatan dengan sumber dana APBD tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						**8,933,167,460,00**							**9,011,482,084,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8,659,987,906,00**							**8,738,483,139,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**8,659,987,906,00**							**8,738,483,139,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**6,159,987,906,00**						-	**6,020,483,139,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4,449,025,860,00			-	-	-	-	4,430,288,560,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	4,428,488,560,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4,428,488,560,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	20,537,300,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,800,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	41,500,000,00			-	-	-	-	22,860,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	41,500,000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22,860,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	478,522,046,00			-	-	-	-	413,514,570,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	9,995,000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7,000,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	12,206,700,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9,999,200,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	19.767.400,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.915.370,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	18.600.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	43.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	21.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	353.950.946,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	-	-	-	1.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	24.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	970.230.000,00			-	-	-	-	964.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	5.910.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	964.320.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		960.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	196.710.000,00			-	-	-	-	188.020.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	156.720.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		156.720.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	39.990.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.300.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	-	-			-	**0,00**						-	**88.870.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	84.310.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				0 Kelompok	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.010.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	8.660.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0 Layanan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.660.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	15.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.950.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				0 Rekomendasi	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.950.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-	-			-	**2.500.000.000,00**						-	**2.518.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	29.165.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				0 Kelompok	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				0 Kelompok	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.485.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				0 Kelompok	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.380.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	4.999.850,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Rekomendasi	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3,000,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Rekomendasi	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1,999,850,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	2,500,000,000,00			-	-	-	-	2,483,835,150,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2,650,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	2,500,000,000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2,353,415,150,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		118,000,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9,770,000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-			-	**0,00**						-	**11,130,000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	11,130,000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11,130,000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	-	-			-	**0,00**						-	**100.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	5,000,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				0 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5,000,000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	95.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95,000,000,00	DINAS PERIKANAN
	X	**NON URUSAN**						**273.179.554,00**							**272.999.554,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**273.179.554,00**							**272.999.554,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**273.179.554,00**						-	**272.999.554,00**	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	257.999.554,00			-	-	-	-	257.999.554,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	257.999.554,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		257.999.554,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15,180,000,00			-	-	-	-	15,000,000,00	DINAS PERIKANAN
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	15,180,000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15,000,000,00	DINAS PERIKANAN
	JUMLAH							8,933,167,460,00							9,011,482,684,00	

BAB V
PENUTUP

Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah difokuskan pada pengelolaan perikanan tangkap khusus pada nelayan tangkap pada Perairan Umum Daratan (PUD) dan perikanan budidaya. Pembatasan kewenangan ini mengakibatkan ruang lingkup pelayanan perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten semakin sempit sehingga diharapkan dapat memberikan ruang untuk penganggaran yang lebih luas dan lebih fokus pada sektor yang menjadi kewenangan kabupaten dalam pengelolaannya sehingga pembangunan sektor perikanan diharapkan lebih memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor perikanan di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini seiring dengan ruang lingkup kewenangan yang lebih sempit lebih difokuskan pada peningkatan dan pengembangan sarana prasarana nelayan tangkap pada Perairan Umum Daratan (PUD), pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya (budidaya pada perairan payau, tawar dan perairan umum) serta ditambah dengan pengembangan pada sektor pengolahan hasil perikanan dan pemasaran produk perikanan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bergerak di sektor perikanan dan peningkatan kemampuan kelembagaan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan.

Dengan semakin berkembangnya sektor perikanan di masyarakat maka kehadiran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor di sektor perikanan sangat diharapkan untuk mendorong agar sektor perikanan dapat berkembang dengan baik, menjadi usaha yang produktif, berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan. Kehadiran pemerintah di sini salah satunya dengan merumuskan dan mengelola kebijakan-kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, lebih tepat sasaran, efisien dan efektif dalam mendorong kegiatan perikanan di masyarakat agar dapat lebih berkembang dan berujung pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat pelaku usaha perikanan itu sendiri.

Melalui Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan semua masukan/usulan masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam Rencana Srategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 Dinas Perikanan dapat terakomodir dan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sektor perikanan serta dapat

memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur (khususnya sektor perikanan) kearah yang lebih baik.

Sampit, Agustus 2023
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kotawaringin Timur

Drs. AHMAD SARWO OBOI
Pembina Utama Muda/ IV/b
NIP. 19700616 199303 1 005

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG	
PELAKSANA	

memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur (khususnya sektor perikanan) kearah yang lebih baik.

Sampit, Agustus 2023

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Kotawaringin Timur

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PERIKANAN

Drs. AHMAD SARWOLOBOI

Pembina Utama Muda/ IV/b

NIP. 19700616 199303 1 005